



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## DAMPAK LETUSAN GUNUNG LEWOTOBİ LAKI-LAKI TERHADAP PARIWISATA INDONESIA

**Lisnawati**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[lisnawati@dpr.go.id](mailto:lisnawati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terjadi pada 20–21 Maret 2025 menimbulkan gangguan besar terhadap sektor penerbangan internasional, terutama yang terhubung dengan destinasi wisata utama seperti Bali. Abu vulkanik yang menyembur hingga 8 kilometer ke langit menyebabkan pembatalan tujuh penerbangan internasional dari Bandara Ngurah Rai, termasuk ke Australia dan Kuala Lumpur. Gangguan ini menunjukkan betapa rentannya pariwisata Indonesia terhadap bencana geologi, khususnya di wilayah yang menjadi simpul utama lalu lintas turis internasional. Letusan ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga lokal, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi wisatawan mancanegara.

Penundaan dan pembatalan oleh maskapai seperti Jetstar, AirAsia, dan Singapore Airlines menunjukkan respons cepat terhadap kondisi darurat, namun juga mengindikasikan potensi kerugian besar dari sisi ekonomi pariwisata. Sebagai destinasi utama wisatawan Australia dan Asia Tenggara, Bali mengalami penurunan arus masuk wisatawan akibat terganggunya akses udara. Dalam jangka pendek, situasi ini dapat memengaruhi tingkat hunian hotel, konsumsi wisatawan, dan agenda-agenda wisata yang telah direncanakan, terutama pada periode liburan. Hal ini menegaskan pentingnya mitigasi risiko dan diversifikasi destinasi wisata.

Menurut Dr. Nur Hidayati, pakar pariwisata berkelanjutan dari Universitas Udayana, kondisi geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan destinasi wisata. Pariwisata Indonesia sangat rentan terhadap gangguan bencana alam. Hal ini memberikan tantangan besar bagi sektor pariwisata, terutama destinasi yang terletak di daerah rawan bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen risiko bencana yang menyatu dengan kebijakan kepariwisataan nasional. Informasi *real-time*, kesiapsiagaan infrastruktur, dan jalur evakuasi di kawasan wisata vulkanik harus menjadi prioritas dalam strategi pariwisata jangka panjang.

Dampak langsung dari letusan juga terasa di kawasan sekitar Gunung Lewotobi, di mana masyarakat setempat menghadapi ancaman hujan batu, lumpur, dan padamnya listrik. Situasi ini menimbulkan kondisi darurat yang tidak hanya berisiko bagi keselamatan warga, tetapi juga menutup kemungkinan berkembangnya potensi wisata lokal berbasis geowisata atau ekowisata. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, Flores mulai dikenal sebagai alternatif destinasi wisata berbasis alam. Namun, tanpa perlindungan dan sistem mitigasi yang kuat, potensi tersebut justru dapat berubah menjadi sumber risiko tinggi bagi wisatawan dan masyarakat.

Oleh karena itu, menjadi penting dilakukan sinergi antara sektor pariwisata, kebencanaan, dan transportasi dalam menghadapi tantangan alam di Indonesia. Kementerian Pariwisata perlu merespons dengan cepat melalui kebijakan darurat dan pemulihan, sekaligus memperkuat sistem promosi wisata aman pasca-bencana. Edukasi terhadap wisatawan, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis risiko harus menjadi fondasi dalam pengelolaan pariwisata

berkelanjutan di tanah air. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya siap menerima kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menjaga keselamatan dan kenyamanan mereka dalam situasi darurat sekalipun.

## Atensi DPR

Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berdampak langsung pada sektor pariwisata menuntut perhatian serius dari DPR RI. Gangguan penerbangan internasional dari Bali akibat semburan abu vulkanik menunjukkan masih lemahnya sistem mitigasi terpadu antara sektor transportasi dan kepariwisataan. Komisi VII DPR RI perlu mendorong revisi dan penguatan regulasi terkait mitigasi bencana di kawasan wisata prioritas, termasuk kewajiban penyediaan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan informasi penerbangan dan jalur evakuasi wisatawan. Komisi VII DPR RI juga diharapkan memperkuat anggaran dan pengawasan terhadap program edukasi kebencanaan bagi masyarakat dan pelaku wisata di daerah rawan bencana, seperti Flores dan Bali. Dengan posisi strategis Indonesia di Cincin Api Pasifik, kebijakan kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari konteks geologis. Komisi VII DPR RI memiliki peran penting untuk mendorong integrasi antara Rencana Induk Pariwisata Nasional (Riparnas) dengan Rencana Kontinjensi Bencana melalui regulasi dan anggaran negara. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan dan keberlanjutan.

## Sumber

cnnindonesia.com, 21 Maret 2025;  
kompas.id, 21 Maret 2025; dan  
regional.kontan.co.id, 21 Maret 2025.

Minggu ke-3 Maret  
(17 s.d. 23 Maret 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*